

ABSTRACT

State income tax is considerable potential to achieve national development goals. From year to year shows that tax revenues continue to rise so it is said that the tax revenues are the main source for financing national development. However, there are many parties that have not implemented the tax obligations even those trying to avoid tax obligations, the action causing tax arrears. In order to prevent the government tax arrears in particular the Directorate General of Taxation tax collection action. To maximize tax collection action, Directorate General of taxes perform actions such as issuing warning letter, followed by the issuance of Disappearance. With the issuance of Coerce warrant, is expected to increase the amount of the disbursement of tax arrears.

The purpose of this study was to determine the effect of the tax collection letter disbursements Coerce warrant to tax arrears. methods used in this study is hypothesis testing methods. The data used in this research is the data the number of letters issued and repaid forced taxpayers in 2010 and 2012 in the Medium Tax Office Bandung. The results showed that there is an influence between the tax collection letter disbursements Coerce warrant to tax arrears.

Keywords: tax collection, coerce warrant and disbursement of tax arrears

ABSTRAK

Pajak merupakan pendapatan Negara yang cukup potensial, untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Dari tahun ke tahun terlihat bahwa penerimaan pajak terus meningkat sehingga dikatakan bahwa penerimaan pajak merupakan sumber utama dalam pembiayaan pembangunan nasional. Walaupun demikian, masih banyak pihak-pihak yang belum melaksanakan kewajiban perpajakannya bahkan pihak tersebut berusaha untuk menghindari kewajiban perpajakannya, adanya tindakan ini menyebabkan timbulnya tunggakan pajak. Untuk mencegah timbulnya tunggakan pajak pemerintah khususnya Direktorat Jendral Pajak melakukan tindakan penagihan pajak. Untuk memaksimalkan tindakan penagihan pajak, DitJen pajak melakukan berbagai tindakan seperti menerbitkan Surat Teguran yang dilanjutkan dengan penerbitan Surat Paksa. Dengan adanya penerbitan Surat Paksa, diharapkan dapat meningkatkan jumlah pencairan tunggakan pajak.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari penagihan pajak dengan Surat Paksa terhadap pencairan tunggakan pajak. metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pengujian hipotesis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data jumlah surat paksa yang diterbitkan dan dilunasi Wajib Pajak pada tahun 2010 hingga 2012 di Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara penagihan pajak dengan Surat Paksa terhadap pencairan tunggakan pajak.

Kata Kunci: Penagihan pajak, Surat Paksa dan pencairan tunggakan pajak

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRACT	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GRAFIK	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	5
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Kegunaan Penelitian	6
 BAB II KAJIAN PUSTAKA, RERANGKA PEMIKIRAN, DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS	 7
2.1 Kajian Pustaka	7
2.1.1 Pajak	7
2.1.1.1 Definisi Pajak	7

2.1.1.2 Pungutan Lain Selain Pajak	8
2.1.1.3 Fungsi Pajak	9
2.1.1.4 Syarat Pemungutan Pajak	10
2.1.1.5 Teori-Teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak	11
2.1.1.6 Pengelompokkan Pajak	13
2.1.1.7 Tata Cara Pemungutan Pajak	14
2.1.1.8 Tarif Pajak	17
2.1.2 Pajak Penghasilan Umum	19
2.1.2.1 Subjek Pajak	19
2.1.2.2 Objek Pajak	23
2.1.2.3 Pengurangan Pajak	29
2.1.2.3.1 Biaya-Biaya yang Diperkenankan Sebagai Pengurang (<i>Deductible Expense</i>)	30
2.1.2.3.2 Biaya-Biaya yang Tidak Diperkenankan Sebagai Pengurang (<i>Non Deductible Expense</i>)	32
2.1.3 Surat Pemberitahuan (SPT)	34
2.1.3.1 Pengertian Surat Pemberitahuan	34
2.1.3.2 Fungsi Surat Pemberitahuan	35
2.1.3.3 Jenis Surat Pemberitahuan	36
2.1.3.4 Penyampaian SPT	37
2.1.4 Penagihan Pajak	40
2.1.4.1 Definisi Penagihan Pajak	40
2.1.4.2 Penagihan Pajak Pasif	41
2.1.4.3 Penagihan Pajak Aktif	45
2.1.5 Penerbitan Surat Paksa	48

2.1.6 Daluarsa Hak Penagihan Pajak	51
2.1.7 Efektivitas	52
2.2 Rerangka Pemikiran	53
2.3. Hipotesis	56
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	57
3.1 Objek Penelitian	57
3.1.1 Sejarah KPP Madya	57
3.1.2 Visi dan Misi KPP Madya	58
3.1.3 Struktur Organisasi	59
3.2 Jenis Penelitian	61
3.3 Operasionalisasi Variabel	61
3.4 Populasi dan Sampel	62
3.5 Teknik Pengumpulan Data	63
3.6 Analisis Data	64
3.6.1 Uji Normalitas.....	65
3.6.2 Uji Regresi Linier Sederhana.....	65
3.6.3 Pengujian Hipotesis.....	65
3.6.4 Koefisien Determinasi	66
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	67
4.1 Pembahasan.....	67
4.1.1 Data Tunggakan Pajak.....	68
4.1.2 Proses Penagihan Aktif	71
4.1.3 Hambatan-Hambatan Penagihan Pajak	74

4.1.4 Evaluasi Penerbitan Surat Paksa	75
4.1.5 Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa	77
4.1.6 Alternatif pemecahan Masalah	79
4.2 Hasil Penelitian	81
4.2.1 Uji Normalitas	81
4.2.2 Uji Regresi Linier Sederhana	82
4.2.3 Pengujian Hipotesis	83
4.2.4 Koefisien Determinasi	84
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	85
5.1 Kesimpulan	85
5.2 Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN	90
RIWAYAT HIDUP (<i>CURRICULUM VITAE</i>)	98

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 1.1 Penerimaan Pajak Tahun 2007-2012	2

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Pajak Daerah	14
Tabel 2.2 Batas Waktu Penyampaian SPT Masa.....	39
Tabel 4.1 Tunggalan Pajak Untuk Tahun 2010	68
Tabel 4.2 Tunggalan Pajak Untuk Tahun 2011	69
Tabel 4.3 Tunggalan Pajak Untuk Tahun 2012	70
Tabel 4.4 Pelaksanaan Penagihan Aktif Tahun 2010	71
Tabel 4.5 Pelaksanaan Penagihan Aktif Tahun 2011	72
Tabel 4.6 Pelaksanaan Penagihan Aktif Tahun 2012	72
Tabel 4.7 Pembayaran Surat Paksa di KPP Madya Bandung	78
Tabel 4.8 Uji Normalitas	81
Tabel 4.9 Uji Regresi Linier Sederhana	82
Tabel 4.10 Pengujian Hipotesis	83
Tabel 4.11 Uji Koefisien Determinasi	84

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Rerangka Pemikiran	56